

POLA SPASIAL DAN TREN KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2020

Sekar Pratiwi¹, Lutfi Setianingrum¹

¹Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera, Jl. Ryaucudu, Lampung Selatan

¹Email : sekarprtiwi@gmail.com

DOI : 10.35472/jppk.v2i3.894

ABSTRACT

The National Medium Term Development (RPJMN) 2020-2024 prioritizes the concept of Sustainable Development (SDGs) and the main target is poverty, this indirectly means that poverty is an important thing that must be prioritized for handling. Achieving common prosperity is a reflection of the success of development that is expected by every country in general, including Indonesia. Prosperity can be measured by a decrease in the level of poverty which if the prosperity of an area increases, it means that there is a decrease in the level of poverty. This paper aims to map the pattern of poverty at two points in time, namely 2015 and 2020 between regions in Indonesia. In mapping poverty patterns and trends, the spatial analysis method is used to determine the distribution pattern of poverty between regions in Indonesia. As a result, there are various patterns of poverty ranging from very low to very high class, with poverty in the east being higher than in the west. Based on the changing trend, regions with high poverty rates such as Papua Island actually had the largest poverty reduction from 2015 to 2020 but this has not been able to change their position into regions with the highest poverty rates.

Keywords: *Patterns, Trends, Gaps, Poverty, Unemployment.*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya kemiskinan hingga saat ini masih menjadi sebuah masalah hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Menurut Liu et al., (2017), kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi semua negara dan komunitas secara keseluruhan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik karena pada berbagai sektor yang belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Solikatur et al., 2018). Mempromosikan pembangunan, mempersempit kesenjangan desa-kota, menghilangkan kemiskinan dan mencapai kemakmuran bersama adalah cita-cita yang terus-menerus dikejar oleh umat manusia.

Percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan sasaran dalam pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengutamakan konsep Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan pada Agenda *United Nations 2030 for Sustainable Development*. Kemiskinan dijadikan tujuan yang pertama bukan tanpa alasan, hal tersebut secara tidak langsung berarti kemiskinan merupakan hal penting yang harus diutamakan penanganannya. Cerminan keberhasilan pembangunan yang

diharapkan oleh setiap Negara pada umumnya termasuk Indonesia ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

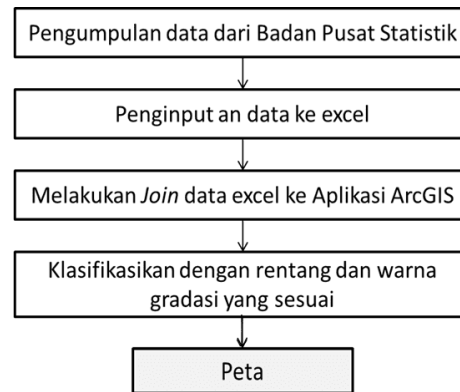
Kesejahteraan pada dasarnya berkaitan dengan kemiskinan, kemiskinan penduduk di Indonesia dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan umum masyarakatnya. Akan tetapi kesejahteraan sulit didapatkan apabila program penanggulangannya cenderung lebih menekankan pendekatan sektoral yang kurang terintegrasi. Selain itu menurut Ritonga (2013) dalam Solikatur et al., (2018) program yang dilaksanakan dalam konteks pembangunan terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memerhatikan pemerataan, seperti yang disebutkan oleh Partridge & Rickman (2006), dalam negara maju sekalipun kelompok kemiskinan tinggi dengan rendah sering ditemui berada dalam jarak yang relatif berdekatan.

Gambaran mengenai kemiskinan dalam hal ini digambarkan dalam fenomena geografis atau bisa disebut sebagai pola spasial kemiskinan, yang mana dimaksudkan untuk memperlihatkan gambaran sebaran kemiskinan antar wilayah sehingga ditemukan wilayah dengan kemiskinan tinggi karena berada pada kelompok kemiskinan tinggi atau wilayah dengan kemiskinan tinggi berdekatan dengan wilayah dengan kemiskinan rendah, jadi dapat disimpulkan kemiskinan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan pembangunan atau karena kelompok wilayah tersebut itu miskin. Sejauh ini belum terdapat penelitian yang dimaksudkan memetakan pola dan tren kemiskinan wilayah di Indonesia, sehingga penting untuk dilakukan guna mengetahui wilayah mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah sehingga tepat dalam menerapkan kebijakan dan merencanakan tata ruang sesuai dengan yang diprioritaskan.

B. Metode Penelitian

1. Analisis Spasial

Penelitian ini menggunakan analisis spasial sebagai alat untuk menggambarkan tingkatan pola kemiskinan yang terjadi pada satuan wilayah tertentu sehingga menghasilkan informasi yang lebih bermakna dan dapat menentukan wilayah yang seharusnya diprioritaskan. Data statistik yang digunakan berupa data persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka dengan lingkup makro ke mikro untuk mengetahui gambaran dalam unit yang luas dan setelah itu ke unit yang lebih rincinya, yaitu dari pulau, provinsi, kabupaten/kota, wilayah metropolitan, wilayah tertinggal dan wilayah terluar di Indonesia dengan membandingkan dua titik waktu yaitu pada tahun 2015 dan 2020. Dilakukan *add data excel* ke *layer* dalam aplikasi ArcGis, kemudian akan menghasilkan peta wilayah dengan perbedaan gradasi warna dan rentang nilai sesuai dengan data. Keluaran dari analisis ini yaitu dua enam peta pada tahun 2015, enam peta tahun 2020 dan enam peta perubahan data tahun 2015 ke 2020. Kemudian hal tersebut dapat menjadi informasi yang akan dianalisis lebih lanjut pada penelitian ini.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

Gambar 1. Bagan Analisis Spasial

2. Klasifikasi perubahan kinerja penanggulangan kemiskinan

Perubahan kinerja penanggulangan kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Perubahan} = \text{IndikatorX } t_1 - \text{IndikatorX } t_2$$

dengan:

t_1 : 2015

t_2 : 2020

Untuk membuat klasifikasi perubahan kinerja penanggulangan kemiskinan berdasarkan angka kemiskinan, maka perlu dikategorikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) **Kelompok tinggi**, nilai rata-rata perubahan plus 1 (+1) standar deviasi ($X \geq Mi + 1 SDi$)
- 2) **Kelompok sedang**, yang mempunyai nilai antara skor rata-rata perubahan minus 1 standar deviasi dan skor rata-rata perubahan plus 1 standar deviasi ($(Mi - 1SDi) \leq X < (Mi + SDi)$)
- 3) **Kelompok rendah**, mempunyai skor lebih rendah dari skor rata-rata perubahan minus 1 standar deviasi ($X < Mi - 1 SDi$)

3. Kriteria Wilayah yang Menjadi Target Prioritas dalam Pembangunan

Dalam penelitian ini, selain untuk melihat pola dan tren kemiskinan, juga ingin merumuskan wilayah yang menjadi target prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

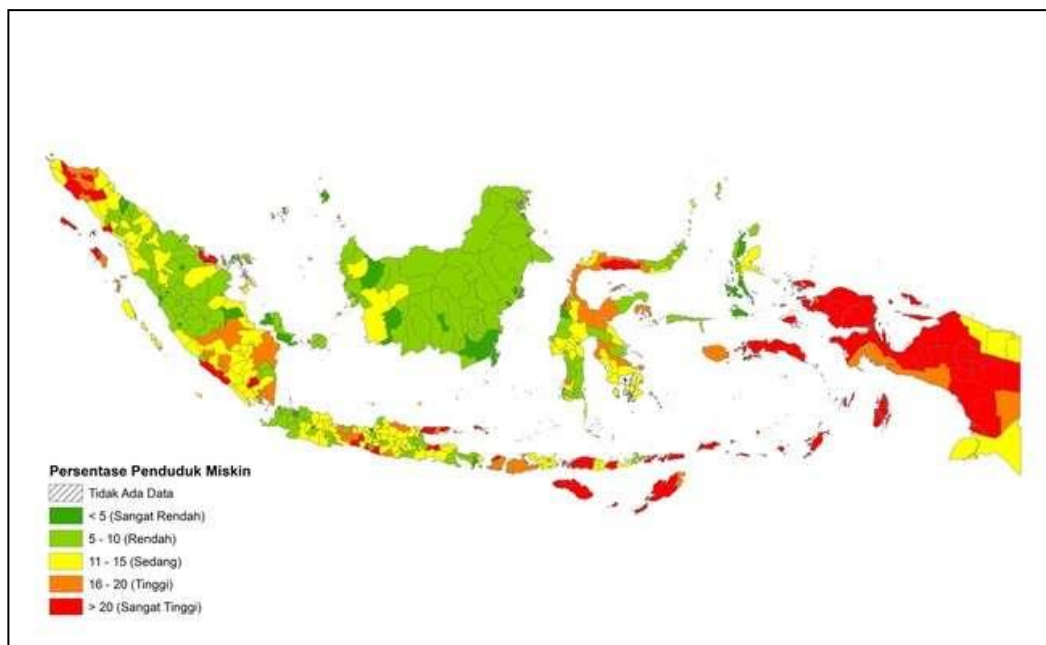
1. Tingkat Kemiskinan pada tahun 2015 dan 2020 tergolong menengah ke tinggi.
2. Perubahan Kinerja penanggulangan kemiskinan tahun 2015-2020 tergolong menengah ke tinggi (mengalami penurunan yang rendah bahkan mengalami peningkatan kemiskinan).

Wilayah yang memenuhi dua kriteria tersebut dapat dijadikan wilayah dengan target prioritas penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pola Spasial Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota di Indonesia

Pola spasial kemiskinan menunjukkan keberagaman tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai berdasarkan persentase penduduk miskin. Dengan mengetahui kondisi kemiskinan di masing-masing wilayah diharapkan dapat memfokuskan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

Gambar 2. Pola Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2015

Pola spasial kemiskinan ditampilkan pada dua titik tahun yaitu 2015 dan 2020 guna mengetahui kinerja penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan. Pada tahun 2015 kemiskinan terparah terjadi pada kabupaten/kota di Pulau Papua dengan rata-rata nilai kemiskinan lebih dari 20 persen atau tingkat kemiskinan sangat tinggi, sedangkan kabupaten/kota di Pulau Kalimantan mayoritas memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Artinya Pulau Kalimantan jika ditinjau berdasarkan nilai kemiskinan yang tercatat pada Badan Pusat Statistik tahun 2015 sudah baik dalam penanganan kemiskinannya jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Pulau lainnya. Wilayah miskin cenderung akan memengaruhi wilayah yang berada didekatnya begitupun sebaliknya, sehingga jika ditelusuri lebih lanjut Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia yang mana memiliki kemiskinan relatif rendah, sehingga hal tersebut akan memengaruhi Pulau Kalimantan memiliki perekonomian lebih baik sehingga cukup jauh dari angka kemiskinan. Berbeda halnya dengan Pulau Maluku-Papua yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil hingga tertinggal, sehingga hal tersebut memengaruhi Pulau Maluku-Papua untuk mendapat perhatian lebih khususnya oleh pemerintah yang diikuti dengan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara karena memiliki nilai kemiskinan yang tercatat dalam

Badan Pusat Statistik tahun 2015 yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

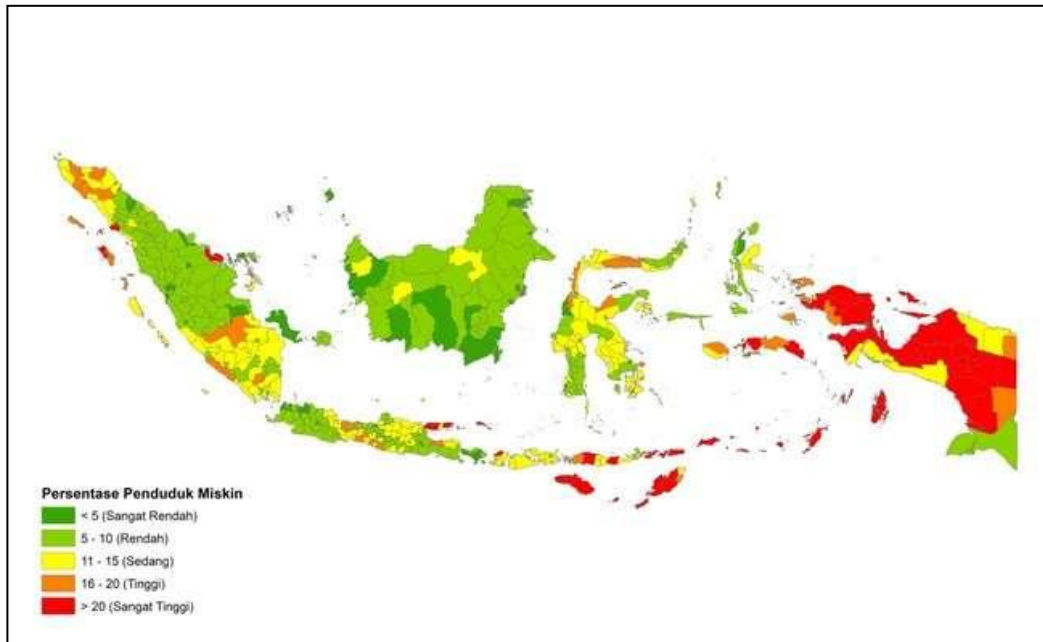
Tabel 1. Peringkat Terendah Dan Tertinggi Kabupaten/Kota Di Indonesia Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015

No	Kemiskinan Terendah		Kemiskinan Tertinggi	
	Kabupaten/Kota	Nilai	Kabupaten/Kota	Nilai
1	Kota Tangerang Selatan	1.69	Deiyai	45.74
2	Kota Sawah Lunto	2.22	Lanny Jaya	41.97
3	Badung	2.33	Intan Jaya	41.34
4	Kota Denpasar	2.39	Yahukimo	41.26
5	Kota Depok	2.40	Jayawijaya	39.48
6	Kota Balikpapan	2.91	Supiori	39.25
7	Kota Ternate	2.99	Puncak	38.74
8	Bangka Barat	3.08	Pegunungan Arfak	38.53
9	Kota Jakarta Timur	3.24	Tambrauw	38.11
10	Banjar	3.26	Puncak Jaya	37.45

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

Tabel 1. menunjukkan peringkat 10 terendah dan 10 tertinggi kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan tabel tersebut wilayah dengan peringkat kemiskinan rendah mayoritas adalah wilayah kota, sedangkan peringkat kemiskinan tertinggi merupakan wilayah kabupaten dan yang tertinggi berada pada Kabupaten Deiyai, hal tersebut sesuai dengan lingkup provinsi dimana Provinsi Papua memiliki kemiskinan yang tinggi. Kabupaten mayoritas kemiskinan tinggi, sesuai dengan beberapa aspek perbedaan antara wilayah kota dan kabupaten, salah satunya berdasarkan aspek sosial budaya yang mana penduduk kota memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang memiliki keterbatasan akan fasilitas pelayanan publik. Oleh karena itu hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kota.

Kurang tepatnya kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan juga menjadi penyebab lainnya, masalah kemiskinan tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan terjadi peningkatan seiring berjalannya waktu. Pada nyatanya pertumbuhan setiap daerah tentunya berbeda satu dengan lainnya, tidak jelas mengapa semua wilayah geografis tidak mengalami pertumbuhan yang menguntungkan yang sama dengan negara secara keseluruhan. bisa jadi beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang lebih rendah atau bahkan faktor spasial yang unik untuk wilayah tertentu mungkin telah mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan. Jika benar demikian, maka kebijakan kemiskinan berbasis orang saja tidaklah cukup, kebijakan dengan menyesuaikan tempat juga diperlukan.



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

Gambar 3. Pola Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2020

Sedangkan pada pola kemiskinan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2020 walaupun terjadi perubahan seperti yang dapat dilihat pada gambar 3, namun perubahan tersebut tidaklah signifikan. Kurang tepatnya kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu hal yang menyebabkan masalah kemiskinan tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan terjadi peningkatan seiring berjalannya waktu. Penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak hanya merangsang motivasi endogen masyarakat miskin, tetapi juga meningkatkan produksi dan kondisi kehidupan di daerah miskin.

Tabel 2. Peringkat Terendah Dan Tertinggi Kabupaten/Kota Di Indonesia Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020

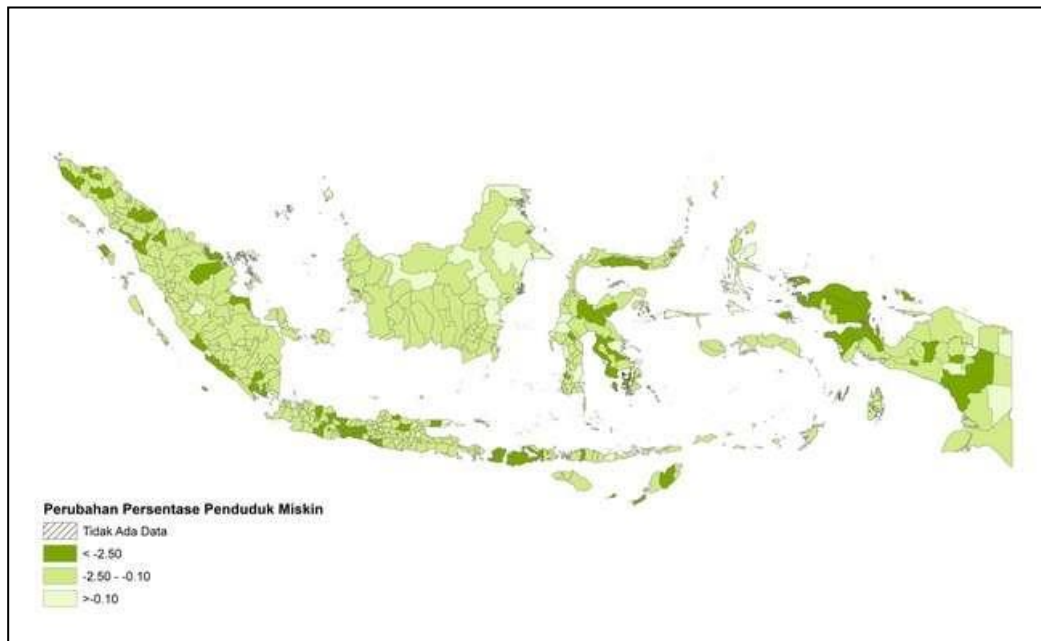
No	Terendah		Tertinggi	
	Kabupaten/Kota	Nilai	Kabupaten/Kota	Nilai
1	Badung	2.02	Deiyai	41.76
2	Kota Denpasar	2.14	Intan Jaya	40.71
3	Kota Sawah Lunto	2.16	Lanny Jaya	38.13
4	Kota Tangerang Selatan	2.29	Yahukimo	37.34
5	Kota Depok	2.45	Jayawijaya	37.22
6	Banjar	2.55	Puncak	36.96
7	Kota Balikpapan	2.57	Supiori	36.91
8	Kota Pekanbaru	2.62	Nduga *	36.72
9	Bangka Barat	2.7	Paniai	36.71
10	Kota Solok	2.77	Mamberamo Tengah	36.41

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

Tidak banyak perbedaan dengan sebelumnya, peringkat kabupaten/kota di Indonesia terendah berdasarkan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 mayoritas adalah wilayah kota, akan tetapi peringkat pertama terendah berada pada wilayah kabupaten tepatnya pada Kabupaten Badung. Kabupaten Badung dikenal sebagai wilayah yang memiliki pusat pariwisata terbanyak di Provinsi Bali karena keindahan alam yang dimilikinya. Dengan keindahan alam yang dimiliki menjadikan Kabupaten Badung memiliki objek wisata populer terbanyak dan hal tersebut pasti memberikan dampak positif untuk masyarakat yang berada pada kabupaten tersebut terutama dalam aspek ekonomi sehingga tingkat kemiskinan pada kabupaten tersebut peringkat pertama terendah dibandingkan dengan 513 kabupaten/kota lainnya. Sedangkan peringkat kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi masih diduduki oleh wilayah kabupaten dengan yang tertinggi masih sama pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Deiyai.

2. Tren Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota di Indonesia

Tren kemiskinan menunjukkan perubahan nilai kemiskinan yang terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2020. Dengan begitu dapat terlihat besarnya penurunan atau peningkatan nilai kemiskinan yang terjadi pada suatu wilayah, sehingga terlihat wilayah dengan tingkat perubahan kemiskinan yang rendah hingga yang mengalami peningkatan nilai kemiskinan dapat dijadikan prioritas dalam pembangunan dan perbaikan kinerja dalam penanggulangan kemiskinan.



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

Gambar 4. Pola Perubahan Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2015 dan 2020

Kinerja kabupaten/kota di Indonesia dalam hal penanggulangan kemiskinan memiliki progress walaupun belum cukup signifikan jika dilihat dari pola perubahan kemiskinan pada gambar 4. Akan tetapi dibuktikan dengan adanya pola perubahan kemiskinan yang

mana mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan angka kemiskinan. Pada wilayah timur Indonesia yang tercatat menduduki kemiskinan tertinggi, nyatanya pada pola yang terjadi mayoritas mengalami penurunan nilai kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada wilayah timur Indonesia memiliki kemiskinan wilayah yang terlampau tinggi, sehingga walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan tetapi hal tersebut belum mampu mengubah pola wilayah dan masih tetap menduduki wilayah dengan kemiskinan tertinggi, dalam kata lain pemerintah harus lebih mengupayakan penanggulangan kemiskinan pada wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel 3 yang menerangkan peringkat perubahan kemiskinan tertinggi dan terendah kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 3. Peringkat Perubahan Tertinggi Dan Terendah Kabupaten/Kota Di Indonesia Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2020

No	Perubahan Tertinggi		Perubahan Terendah	
	Kabupaten/Kota	Nilai	Kabupaten/Kota	Nilai
1	Kota Gunung Sitoli	-9.01	Kota Jakarta Utara	0.87
2	Kepulauan Meranti	-8.80	Kota Jakarta Timur	0.92
3	Nias Utara	-7.55	Mahakam Hulu	0.94
4	Teluk Bintuni	-7.27	Kutai Barat	0.96
5	Lombok Utara	-7.14	Bengkulu Tengah	0.97
6	Teluk Wondama	-6.53	Kota Tarakan	1.13
7	Sorong	-5.87	Kota Tidore Kepulauan	1.14
8	Manokwari Selatan	-5.45	Flores Timur	1.18
9	Tambrauw	-5.31	Kepulauan Seribu	3.47
10	Fakfak	-5.24	Konawe Utara	3.56

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

Berdasarkan peringkat perubahan kemiskinan mayoritas kabupaten/kota yang menduduki peringkat dengan perubahan tertinggi atau yang mengalami penurunan kemiskinan tertinggi adalah kabupaten/kota Pulau Maluku-Papua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan pada Pulau Maluku-Papua sudah baik akan tetapi masih belum mampu mengangkat pulau tersebut dari kemiskinan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh sangat tingginya kemiskinan wilayah pada pulau tersebut atau kebijakan penanggulangan kemiskinan yang seharusnya tidak bisa disamakan dengan kebijakan pada daerah lainnya yang memiliki kemiskinan jauh lebih rendah dari Pulau Maluku-Papua.

3. Target Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia

Prioritas penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk memperbaiki keberlanjutan wilayah khususnya pada wilayah-wilayah dengan nilai kemiskinan yang tinggi. Untuk mengetahui wilayah yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat berdasarkan nilai kemiskinan dari masing-masing kabupaten/kota dan dengan pertimbangan perubahan nilai kemiskinan dari tahun 2015 ke 2020 yang telah dihitung

sebelumnya. Prioritas pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang pertama dilakukan adalah pada Kabupaten Deiyai, karena memiliki nilai kemiskinan tertinggi pada dua titik tahun walaupun terjadi penurunan pada kabupaten tersebut. Pada dasarnya dalam penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama karena dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang akan menekan laju pertumbuhan angka kemiskinan, akan tetapi tidak semua wilayah dapat berhasil jika hanya dengan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan dengan mempertimbangkan wilayah atau tempat juga diperlukan.

Prioritas pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang kedua dilakukan terhadap Kabupaten Intan Jaya dengan nilai kemiskinan tertinggi kedua setelah Kabupaten Deiyai dengan penurunan kemiskinan yang cenderung rendah. Selanjutnya terdapat Kabupaten Nduga dan Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nilai kemiskinan tinggi diikuti dengan peningkatan nilai kemiskinan. Prioritas pembangunan dan penanggulangan kemiskinan selanjutnya antara lain Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Ende, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Boven Digoel. Artinya kabupaten-kabupaten tersebut perlu diberikan perhatian lebih guna mengatasi tingginya nilai kemiskinan yang terjadi.

Tabel 3. Target Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin		
		2015	2020	Perubahan
1	Deiyai	45.74	41.76	-3.98
2	Intan Jaya	41.34	40.71	-0.63
3	Nduga *	35.89	36.72	0.83
4	Mamberamo Tengah	35.54	36.41	0.87
5	Paniai	37.43	36.71	-0.72
6	Dogiyai	29.10	28.62	-0.48
7	Ende	23.49	23.76	0.27
8	Konawe Kepulauan	16.73	17.01	0.28
9	Sumenep	20.20	20.18	-0.02
10	Boven Digoel	19.50	19.41	-0.09

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

D. Kesimpulan

Indonesia memiliki beragam pola kemiskinan, dengan kabupaten/kota pada wilayah timur Indonesia memiliki kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota wilayah barat Indonesia. Namun sebagian besar kabupaten/kota wilayah timur mengalami penurunan kemiskinan yang besar, sedangkan kabupaten/kota wilayah barat Indonesia cenderung mengalami penurunan yang lebih rendah bahkan mengalami peningkatan. Wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi cenderung mengalami penurunan terbesar, demikian hal pada Pulau Maluku-Papua yang menduduki pada kemiskinan sangat parah, sehingga walaupun kinerja penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sudah baik akan tetapi belum cukup mampu mengangkat pulau tersebut dari

kemiskinan. Oleh karena itu untuk kedepannya wilayah timur Indonesia sudah seharusnya menjadi fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan tanpa melupakan wilayah lain yang sudah stabil dalam mengatasi kemiskinannya. Selain itu, kebijakan yang dibuat haruslah sesuai, karena hal tersebut berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang dibuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih terkait pada kebijakan berbasis orang seperti bantuan terhadap orang yang tidak mampu, sehingga perlu dipertimbangkan pentingnya menerapkan kebijakan berbasis tempat seperti pemberian keringanan pajak pada wilayah lokal dengan kemiskinan tinggi seperti pada kabupaten/kota wilayah timur Indonesia. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan juga sangatlah penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik Nasional. (n.d.). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- [2] BPS Indonesia. (2021). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2020*, 07(56), 1–12.
- [3] Liu, Y., Liu, J., & Zhou, Y. (2017). Spatio-temporal patterns of rural poverty in China and targeted poverty alleviation strategies. *Journal of Rural Studies*, 52, 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.04.002>
- [4] Partridge, M. D., & Rickman, S. (2006). *The Geography of American Poverty*. W.E. Upjohn Institute for Employment Research.
- [5] Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- [6] The World Bank. (2006). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *The World Bank*, 112(483), 211–212.